

Judul : Anggaran dan Mutu Pendidikan Belum Selaras
Tanggal : Senin, 04 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Anggaran dan Mutu Pendidikan Belum Selaras

Anggaran pendidikan tiap tahun mencapai 20 persen dari total belanja APBN. Namun, penyediaan anggaran ini belum berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS — Investasi pendidikan melalui alokasi anggaran minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD secara legal formal telah terpenuhi. Namun, pada saat yang sama, sejumlah indikator menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1).

Besaran anggaran pendidikan dari tahun ke tahun pun terus meningkat. Pada 2016, alokasinya mencapai Rp 416,59 triliun. Pada 2026, jumlah itu naik menjadi Rp 769,09 triliun.

Akan tetapi, besarnya dukungan anggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan

>> BACA JUGA:

Pendidikan Bermutu Mendesak Diwujudkan

Pendidikan bermutu untuk semua jangan berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan. **KOMPASID**

komp.as/pendidikanbermutu

pemanfaatannya. Lebih dari separuh anggaran masih terserap untuk belanja pusat, seperti gaji dan tunjangan, pendidikan kedinasan di sejumlah kementerian/lembaga, serta pos-pos yang dinilai bukan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran.

Akibatnya, sulit bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ataupun pemerintah daerah

untuk memacu akselerasi peningkatan mutu pendidikan yang inklusif. Kondisi ini terlibat dari hasil tes kemampuan akademik (TKA) siswa Indonesia.

Nilai TKA siswa SMA untuk mata pelajaran Matematika rata-rata hanya 36,1, sedangkan Bahasa Indonesia 55,38. Hasil TKA itu memperkuat temuan selama ini bahwa kemampuan dasar siswa Indonesia masih tertinggal di tingkat global dalam lebih dari dua dekade terakhir.

Pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor numerasi Indonesia adalah 366, di bawah skor rata-rata dunia 472. Pada aspek literasi, skor Indonesia adalah 359, juga di bawah rata-rata skor dunia, yaitu 476. Skor Indonesia di sains, yaitu 383, juga di bawah rata-rata skor dunia sebesar 485.

Kualitas pendidikan Indonesia yang masih memprihatinkan juga tampak dari data

Anggaran Pendidikan pada APBN Tahun Anggaran 2016-2026

Tahun Anggaran	Anggaran Pendidikan (Rp Triliun)	Belanja Pusat (Rp Triliun)	Transfer ke Daerah (Rp Triliun)
2016	416,59	144,96	266,63
2017	426,70	148,55	267,66
2018	444,13	149,68	279,45
2019	492,46	163,09	308,38
2020	547,83	187,90	284,51
2021	550,01	184,54	299,06
2022	621,29	213,36	290,54
2023	624,25	249,16	305,60
2024	665,02	241,47	346,56
2025	724,26	297,17	347,09
2026	769,09	470,46	264,62

Sumber: Peraturan Presiden tentang APBN (2016-2026).
Disolah Litbang Kompas/Flas

(Bersambung ke him 15 kol 4-7)

Anggaran dan Mutu Pendidikan Belum Selaras

(Sambungan dari halaman 1)

Trends in International Mathematics and Science Study. Pada 2015, Indonesia berada di peringkat ke-44 dari 49 negara yang diukur.

"Rendahnya mutu hasil belajar akan memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia, menurunkan daya saing, dan produktivitas angkatan kerja di masa mendatang, termasuk pendapatan domestik bruto," kata Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Sementara itu, pendiri SMK Bakti Karya Parigi di Jawa Barat, Ai Nurhidayat, mengatakan, anggaran pendidikan yang memadai sangat penting untuk menopang pembiayaan operasional sekolah swasta agar tetap terjangkau bagi siswa. Namun, pada 2026, sekolah yang sebelumnya menerima bantuan pemerintah pusat dan daerah Rp 1,6 juta per siswa per bulan justru mengalami pemotongan.

Pemangkasan bantuan operasional sekitar Rp 600.000 per siswa per bulan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini dikhawatirkan

akan membebani sekolah dan mempersempit akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memaparkan, berbagai upaya perbaikan mutu telah dilakukan dalam dua tahun terakhir. Langkah itu antara lain mendorong pendekatan pembelajaran mendalam, merevitalisasi puluhan ribu sekolah, membagikan ratusan ribu papan interaktif digital, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, serta memperkuat pendidikan karakter.

Menurut Mu'ti, pendidikan bermutu untuk semua menjadi komitmen pemerintah. "Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan terlaksana tanpa tiga *M: mind-set* atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai capaian angka-angka kuantitatif," ujarnya.

Masalah alokasi anggaran

Dari data anggaran pendidikan APBN 2016-2026, ter-

lihat tren kenaikan alokasi anggaran pendidikan dari Rp 416,59 triliun pada 2016 menjadi Rp 769,09 triliun pada 2026. Namun, peningkatan anggaran itu belum sepenuhnya mencerminkan penguatan belanja yang langsung menyasar kebutuhan inti pendidikan.

Sejak anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Rp 56,80 triliun pada 2025 dan Rp 223,56 triliun pada 2026, komposisi belanja pusat dalam dua tahun terakhir meningkat. Pada saat yang sama, pertumbuhan transfer ke daerah justru menurun.

Pada 2025, pertumbuhan transfer ke daerah hanya meningkat 0,15 persen dibandingkan 2024. Padahal, besar transfer ke daerah pada 2024 meningkat 13,40 persen dibandingkan 2023. Sementara pada 2026, transfer ke daerah tercatat minus 23,76 persen dibandingkan tahun 2025.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena daerah memegang peran penting dalam pembiayaan sekolah, perbaikan sarana, dan layanan pendidikan dasar-menengah.

Terkait penggunaan anggar-

an pendidikan untuk membiayai program MBG bagi anak sekolah dan madrasah dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah, muncul gugatan dari perwakilan guru honorer, organisasi guru, masyarakat, dan akademisi melalui uji materiil atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengakui, pemenuhan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan nasional selama ini masih bersifat legal formal, belum substantif. "Kami menilai pendekatan anggaran masih terlalu umum dan belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan, terutama kesenjangan antarwilayah yang sangat timpang," kata Hetifah.

Menurut dia, meskipun jumlah nominal anggaran pendidikan terus meningkat, realisasinya terhadap total belanja negara belum benar-benar menembus angka 20 persen sejak 2007. Sebagian dana pendidikan pun kerap ditempatkan pada pos pembiayaan atau cadangan, bukan murni sebagai belanja, sehingga berpotensi tidak terserap optimal di lapangan.

(ELN/TIO/FRN)